

Tata kelola kedaulatan laut indonesia sebagai negara maritim

Amaliya Nadhifah

Program studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Email: nadhifa1607@gmail.com

Kata Kunci:

Indonesia, Pulau, Wilayah, Internasional, Maritim.

Keywords:

Indonesia, Island, Region, International, Maritime.

ABSTRAK

Sebagai penduduk daratan dan lautan, petani dan pelaut, Indonesia adalah bangsa yang sadar diri. Para pendiri negara benar-benar menyadari bahwa air, selat, dan lautan di antara belasan ribu pulau Indonesia—dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Deli, dari Pulau Sekatung hingga Pulau Ndana—adalah satu kesatuan yang utuh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan pengakuan internasional tanpa kekuatan militer, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya. Laut memainkan peran penting dalam menguatkan dan mempersatukan sebuah negara karena

merupakan sarana untuk kesatuan bangsa, pertahanan dan keamanan, diplomasi, dan, yang paling penting, untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara dan penduduknya karena potensi sumber daya laut yang melimpah. Indonesia adalah negara maritim dengan beribu-ribu pulau. Sebagian besar negara ini terdiri dari perairan, dan sisanya adalah daratan. Aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih berharga secara strategis setelah Indonesia diakui sebagai negara kepulauan oleh masyarakat internasional. Selain posisinya di persilangan antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera, Samudera Pasik dan Samudera Hindia, Indonesia juga berada di antara Samudera Hindia dan Laut China Selatan dan Laut Asia Timur. Setelah itu, kemerdekaan dan keutuhan wilayah Indonesia menjadi dasar untuk merancang rencana pembangunan yang lengkap dan menyeluruh.

ABSTRACT

As a land and sea dweller, farmer and sailor, Indonesia is a self-aware nation. The founding fathers of the nation truly realized that the water, straits, and oceans between the tens of thousands of Indonesian islands—from Rondo Island to Merauke, from Miangas Island to Deli Island, from Sekatung Island to Ndana Island—are a unified whole. As the largest archipelagic country in the world with international recognition without military power, Indonesia is the only country capable of expanding its sovereign territory and sovereign rights. The sea plays an important role in strengthening and uniting a country because it is a means for national unity, defense and security, diplomacy, and, most importantly, for the prosperity and welfare of the country and its people because of the abundant potential of marine resources. Indonesia is a maritime country with thousands of islands. Most of this country consists of water, and the rest is land. The geographical aspect of the Unitary State of the Republic of Indonesia becomes more strategically valuable after Indonesia was recognized as an archipelagic country by the international community. In addition to its position at the crossroads of two continents, Asia and Australia, and two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean, Indonesia is also located between the Indian Ocean and the South China Sea and the East Asia Sea. After that, the independence and territorial integrity of Indonesia became the basis for designing a complete and comprehensive development plan.

Pendahuluan

Kekuasaan eksklusif dan bebas suatu negara atas wilayah lautnya adalah kedaulatan maritim. Selama bertahun-tahun diplomasi, Indonesia mempertahankan kedaulatan maritimnya. Dengan 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Indonesia,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan maritimnya. Ini sesuai dengan kepentingan konstitusionalnya untuk menguasai dan memanfaatkan laut. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki visi tentang kelautan. Visi ini digambarkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, di mana Indonesia akan menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, dan mampu memberikan kontribusi positif untuk keamanan dan perdamaian wilayah dan dunia secara proporsional.

Dengan visi Poros Maritim Dunia, Indonesia menempatkan laut sebagai masa depan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kelautan sangat penting untuk menopang perekonomian nasional, mempertahankan kedaulatan, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Mencakup pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pengembangan sektor perikanan, pembangunan infrastruktur maritim, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Namun, Indonesia menghadapi banyak masalah dalam proses mewujudkan visi ini. Penanganan masalah yang sangat penting termasuk ancaman pelanggaran kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pencurian ikan, dan masalah lingkungan seperti pencemaran laut dan kerusakan ekosistem. Selain itu, untuk memastikan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus terus meningkatkan diplomasi maritim dan kerja sama internasional karena perubahan geopolitik yang terjadi di sana.

Oleh karena itu, posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya bertumpu pada aspek kedaulatan dan keamanan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, penguatan ekonomi berbasis kelautan, dan kontribusi terhadap stabilitas global. Visi Poros Maritim Dunia ini menjadi komitmen Indonesia dalam membangun masa depan yang berorientasi pada laut sebagai pusat pembangunan nasional. Salah satu pilar utama yang disorot dalam visi ini adalah pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya sumber daya lautan, baik dari segi keanekaragaman hayati, maupun potensi perikananannya. Jika dilakukan dengan tepat, pengelolaan ini tidak saja akan melindungi kehidupan laut, tetapi juga menaikkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar pantai serta nelayan. Secara demikian, visi Poros Maritim Dunia bukannya hanya semacam slogan, melainkan telah menjadi komitmen Indonesia untuk masa depan yang benar-benar berorientasi pada laut sebagai jantung dari pembangunan nasional kita. Dengan tindakan-tindakan nyata dalam arti pengelolaan lautan, ekonomi kelautan dan stabilitas global, Indonesia berpeluang vonisur kepada suatu kekuatan kelautan yang disegani di level internasional.

Pembahasan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 82% wilayahnya di darat dan 20% di laut. Indonesia juga menjadi pusat perdagangan global karena lokasinya yang strategis. Konsep Wawasan Nusantara, UU No 4 Tahun 1960 tentang Perairan, dan UNCLOS 1982 kemudian menambah pemahaman kita tentang Negara Maritim. Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah dasar dari pemahaman ini. Di Makassar pada tanggal 18 Desember 1996, Deklarasi Negara Maritim Indonesia juga dicanangkan. Dewan Kelautan Nasional kemudian membuat konsep Negara Maritim Indonesia.

Indonesia dalam menata kedaulatan laut sebagai negara maritim tidak asal menata dan mengelolanya akan tetapi memiliki konvensi hukum laut yang kedaulatan suatu negara sudah diatur dalam konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982. Pengaturann hak berdaulat Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 5 Tahun 1983. Sedangkan pengaturan nasional mengenai hak berdaulat ini mengambil pasal 56 ayat (1) di ketentuan UNCLOS 1982.

Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen adalah bagian dari yurisdiksi Indonesia di luar laut. Indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di wilayah ini. Laut teritorial Indonesia selebar 12 mil laut dari pangkal kepulauan Indonesia. Selain itu, posisi geografisnya yang strategis dan fungsi lautnya sangat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui jalur perdagangan, sumber daya ikan, dan pariwisata. Laut tidak hanya berfungsi sebagai jalan perdagangan tetapi juga sebagai sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat pesisir. Faktor geografis yang sangat penting untuk keamanan suatu negara adalah keadaan lautnya.

Untuk meningkatkan hasil ekspor produk kelautan dan perikanan, yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan, sektor ini sangat penting untuk pembangunan nasional. Integrasi masyarakat di wilayah maritim dengan pembangunan maritim dapat membantu pertumbuhan ekonomi baik di darat maupun di laut. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kontrol maritim kedaulatan Indonesia. Setiap tata kelola dan pengelolaan membawa tantangan tersendiri, seperti bagaimana menjaga kedaulatan laut Indonesia, karena negara ini bergantung pada laut. Karena Indonesia akan menghadapi banyak tantangan dan peluang, paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus perlahan digeser untuk menjadi prioritas pembangunan ekonomi masyarakat.

Membangun infrastruktur kelautan yang mampu mendukung posisi Indonesia sebagai pusat maritim dunia adalah salah satu prioritas utama. Sumber daya laut harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Upaya ini mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, penangkaran laut konservasi, dan penangkapan ilegal. Bukan hanya kelestarian sumber alam yang diperoleh, tetapi juga peluang ekonomi yang lebih besar untuk komunitas pesisir dalam jangka panjang. Indonesia harus meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya untuk menghadapi ancaman lintas batas melalui peningkatan kemampuan angkatan laut dan kerja sama dengan negara lain. Perlindungan kepentingan nasional dan ZEE, wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk dalam hal ini.

Untuk mengatasi tantangan perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan degradasi lingkungan pesisir, sektor-sektor seperti energi terbarukan dari laut, bioteknologi kelautan, dan ekowisata harus didorong sebagai alternatif penggerak ekonomi. Selain itu, sumber daya manusia adalah kunci untuk tata kelola maritim yang baik. Pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan harus diperbaiki dengan memberikan penekanan pada keterampilan teknologi modern yang relevan dengan industri kelautan. Indonesia dapat memaksimalkan potensinya di sektor laut dan menjadi pesaing global dengan sumber daya manusia profesional.

Untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan kesejahteraan selama pembangunan kelautan, masyarakat pesisir harus berpartisipasi secara aktif dalam strategi pengelolaan laut. Kemitraan antara pasar, akses modal, dan teknologi harus diperluas. Kerja sama internasional sangat memengaruhi kedaulatan maritim. Dengan diplomasi maritim yang kuat, Indonesia dapat mempertahankan kepentingannya yang strategis di wilayah Indo-Pasifik. Potensi laut sebagai penggerak utama perekonomian harus menjadi fokus kebijakan pembangunan nasional. Indonesia dapat menjadi negara maritim yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan dengan pendekatan menyeluruh. Laut Indonesia adalah aset penting bagi negara dan memiliki peran strategis di tingkat global.

Kebijakan yang berfokus pada manajemen sumber daya kelautan secara berkelanjutan harus diperkuat terus menerus. Mengurangi polusi laut dan kerusakan ekosistem laut oleh aktivitas manusia adalah langkah utama. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, Indonesia memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk menjaga kelestariannya. Selain itu, pembangunan infrastruktur maritim merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Arus barang dan orang dapat dipercepat berkat pelabuhan modern dan efisien, sistem transportasi laut yang terintegrasi, dan jaringan logistik yang kuat. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada laut. Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan harus menjadi prioritas utama.

Dalam komitmen yang dibuat pada Desember 2020, Indonesia berkomitmen untuk mengelola secara berkelanjutan seratus persen wilayah laut dalam yurisdiksinya pada tahun 2025. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maritim yang kuat dan berdaya saing di dunia. Ini akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Meskipun Indonesia menjalankan kedaulatan lautnya sendiri, itu telah diatur oleh peraturan yang ditetapkan secara nasional dan internasional, seperti UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Dasar. Salah satu peraturan ini adalah zona eksklusif ekonomi, atau ZEE, yang mencakup area seluas 200 mil laut dari garis dasar pantai, di mana negara yang memiliki pantai memiliki hak atas kekayaan alam di wilayah tersebut dan berhak untuk melakukan. Suatu negara memiliki kedaulatan maritim, yang berarti bahwa negara tersebut memiliki otoritas eksklusif dan bebas untuk melakukan berbagai kegiatan kenegaraan di wilayah lautnya. Dengan peraturan dan lokasi geografis yang strategis, Indonesia dapat meningkatkan tata kelola maritimnya untuk meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Serta, upaya ini mencakup pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan laut, dan pengembangan sektor maritim seperti transportasi laut, perikanan, dan pariwisata bahari. Dengan melakukan hal ini, Indonesia akan menjadi negara maritim yang mandiri, berdaulat, dan berkontribusi besar pada ekonomi dunia.

Daftar Pustaka

- Arrahma, F. (2024). Optimilisasi Tata Kelola Kedaulatan Laut Indonesia:Tantangan dan Strategi. Retrieved December 25, 2024, from <https://www.kompasiana.com/faizaharrahma6339/675823e3ed641513480aa792/optimalisasi-tata-kelola-kedaulatan-laut-indonesia-tantangan-dan-strategi>
- Ginting, A. H. (2020). Tata Kelola Kebijakan Maritim di Indonesia dalam Perspektif Sound Governance. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 36–50. Retrieved from <https://doi.org/10.33701/jt.v12i1.822>
- Gischa, S. (2023). Pengertian Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Retrieved December 25, 2024, from <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/05/130000869/pengertian-laut-teritorial-landas-kontinen-dan-zona-ekonomi-eksklusif>
- Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Chotimah, H. C. (2020). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia untuk Menjaga Keamanan Maritim. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. (2017). Kebijakan Kelautan Indonesia. *Maritim.Go.Id*, 70. Retrieved from https://maritim.go.id/konten/unggahahan/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf
- Nugraha, T. A., & Irman. (2014). Perlindungan Hukum Zona Ekonomi-Eksklusi. *Jurnal Selat*, 2(1), 156–167.
- Rizky Haryanto., A. W. (2021). 3 Upaya Mempercepat Realisasi Transformasi Laut Berkelanjutan bagi Indonesia. Retrieved from <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/3-upaya-mempercepat-realisisi-transformasi-laut-berkelanjutan-bagi-indonesia>
- Yuniarto, T. (2024). Kedaulatan Maritim Indonesia: Sejarah dan Potretnya. Retrieved December 24, 2024, from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kedaulatan-maritim-indonesia-sejarah-dan-potretnya>
- Zarwaki, Z., Aunur, R., & Suwandi, S. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparaturnya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6909-6919. <http://repository.uin-malang.ac.id/12795/>